



## PPDB JALUR PRESTASI DAN ZONASI MUTU Proses Seleksi SMP Gunakan Nilai Rapor

**YOGYA (KR)** - Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sekolah negeri di Kota Yogya, khususnya jenjang SD dan SMP, sedikit ada perubahan dibanding tahun sebelumnya. Salah satunya untuk proses seleksi ke jenjang SMP negeri pada jalur prestasi dan zonasi mutu yang tidak lagi mengandalkan ujian sekolah daerah (UASDA), melainkan nilai rapor.

Ketentuan tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) 35/2020 yang menggantikan Perwal 20/2020. Perubahan ketentuan itu karena menyesuaikan kondisi pembelajaran pada masa pandemi Korona sehingga UASDA ditiadakan. "Pada perwal yang baru, mekanismenya sudah disesuaikan," tandas Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya Budi Santoso Asrori, Senin (4/5).

Sesuai kebijakan yang baru, proses seleksi untuk PPDB zonasi mutu maupun jalur prestasi ditentukan dari Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) dan in-

deks sekolah. Nilai SKRS atau rapor antar sekolah pun berbeda-beda sehingga perlu ada alat untuk koreksi berupa indeks sekolah. Sementara penentuan indeks sekolah akan diatur secara khusus dalam juknis dalam waktu dekat. Meski begitu, tidak akan berbeda dengan DIY yakni berupa nilai rata-rata ujian sekolah selama tiga tahun terakhir.

Budi menjelaskan, secara umum sistem PPDB masih sama yakni dengan *real time online* atau RTO. Selain itu zonanya juga tidak berubah yakni zonasi wilayah dengan kuota 25 persen, zonasi mutu 35

persen, afirmasi keluarga tidak mampu 10 persen, afirmasi penyandang disabilitas 5 persen, mutasi 5 persen, jalur prestasi bibit unggul 10 persen dan jalur prestasi luar daerah 10 persen.

"Untuk kuotanya ada sedikit perubahan. Tapi itu kami sesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan," urainya.

Selain itu, teknis dalam proses verifikasi di sekolah, Dinas Pendidikan mengimbau agar semua dapat dilakukan secara online. Hal ini agar tidak lagi ada kerumunan di tiap sekolah se-

perti tahun-tahun sebelumnya. Silih bergantinya orang yang datang ke sekolah memiliki risiko tinggi dalam penyebaran virus Korona.

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri ada orangtua siswa yang membutuhkan konsultasi ke sekolah. Konsultasi itu pun diimbau tidak melibatkan anak didik dan pihak sekolah menyediakan ruang di luar atau area terbuka. Selain itu, layanan konsultasi harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Juknis masih kita rumuskan, sudah tahap akhir untuk menentukan format yang tepat. Begitu juga jadwal PPDB, perlu kami koordinasikan bersama DIY supaya seragam semua. Tapi yang jelas mulai Juni," tandas Budi.

**(Dhi)-o**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005